

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Algra, N.E et.all. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*. BINACIPTA. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta,
- Bakhri, H. Syaiful. 2011. *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Effendy, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Refrensi (Gaung Persada Press Group). Jakarta.
- Hadisoeparto, Hartono. 2011. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. 1984. *Perbandingan KUHP HIR dan Komentar*. Ghalia Indonesia. Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2014, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hiariej, Eddy. O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Hatta, Mohammad . 2008. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*. Galang Press. Yogyakarta.
- Karjadi, M dan R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Politea. Bogor.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014. *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia, Pusat Data dan Layanan Informasi*. Jakarta.

- Lamintang, P.A.F. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Sinar Baru. Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Penerbit Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- M, Poentang Moerad B. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Penerbit P.T Alumni. Bandung.
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*. UII Press. Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahany*. PT. Alumni. Bandung.
- N,E Algra dkk. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Binacipta. Bandung.
- Poernomo, Bambang. 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Amarta Buku. Yogyakarta.
- Prints, Darwan. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Rukmini, Mien. 2003. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Penerbit P.T Alumni. Bandung.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*. Mandar Maju. Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pres. Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. 2013. *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*. Setara Press. Malang.

B. Jurnal

- Andi Hamzah, 1968, "Satu dua catatan mengenai alat-alat bukti dalam Acara Pidana", *Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 4-5/Tahun ke-V Edisi.
- Moh. Kosnoe, 1995, "Apa Artinya Juridis Itu Kajian Ukuran Dan Persoalanya Dewasa Ini", *Varia Peradilan*, No. 118.

Yap Thiam Hien, 1974, “Hak-Hak Azasi Manusia Dalam Realitas Hukum Di Indonesia Sekarang”, *Hukum dan Masyarakat*, No. 2 Th VIII.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang: Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).

Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 03/PB/MA/IX/2012 & 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

D. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-X/2012 perihal Pengujian Materiil Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara 1981 Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara 1981 Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

E. Internet

Admin, “Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/>, pada tanggal 25 Juni 2019 pada pukul 12:00 WIB.

Dosen Pendidikan, “Pengertian Narasumber Menurut Para Ahli Terlengkap”, <https://www.dosenpendidikan.com/pengertian-narasumber-menurut-para-ahli-terlengkap/>, pada tanggal 13 Juli 2019 pada pukul 08:00 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Pengawasan, “Hukuman Disiplin Bulan Oktober 2019”, https://bawas.mahkamahagung.go.id/images/file_kumdis/kumdis%20periode%20oktober%202019.pdf, pada tanggal 21 Februari 2020 pada pukul 08:40 WIB.

Sovia Hasanah, “Apakah Eksaminasi Mengubah Putusan Hakim?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt599b858a6d6e7/apakah-eksaminasi-mengubah-putusan-hakim>, pada tanggal 22 Januari 2020 pada pukul 12:43 WIB

_____, “II Tinjauan Pustaka”, <http://digilib.unila.ac.id/2308/8/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 20 Februari 2020 pada pukul 13:43 WIB

F. Penulisan Hukum

Faizal, Arifanny. 2015. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Pidana terkait Asas *Litis Finiri Oportet*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Manalu, Iwan Tanama . 2017. “Pemenuhan Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Musais, Ibnu Hakam. 2014. “Dinamika Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Pelaksanaan Asas Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Mandiri”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Noviyati, Annisa. 2017. “Kompetensi Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Tindakan Aparat Penegak Hukum dalam Melakukan Upaya Paksa Penetapan Tersangka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.